

## **Pengaruh Dinamika Politik Terhadap Kepercayaan Publik Pada Pemilu Di Indonesia (Studi Kasus Pemilu 2024 Pada Pemilih Pemula Di Wilayah Kecamatan Jambangan Kota Surabaya)**

**Rifky Alif Dharmawan <sup>1)</sup>, Katon Galih Setyawan <sup>2)</sup>, Agung Stiawan <sup>3)</sup>, Ali Imron <sup>4)</sup>**

1), 2), 3), 4) Program Studi S1 Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya

### **Abstrak**

Pemilu merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi Indonesia yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memilih pemimpin dan wakil mereka. Namun, dinamika politik yang terjadi selama pemilu, seperti konflik antarpolisi, kebijakan pemerintah yang kontroversial, dan ketidaktransparanan dalam proses pemilu, dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap sistem pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dinamika politik terhadap kepercayaan publik, khususnya pemilih pemula, terhadap pemilu di Indonesia. Pendekatan kuantitatif digunakan dengan teknik survei, di mana data diperoleh melalui kuesioner yang disebarluaskan kepada 100 responden pemilih pemula di Kecamatan Jambangan. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik probability sampling, dan analisis data menggunakan regresi linear berganda untuk menguji hubungan antara dinamika politik (variabel independen) dan kepercayaan publik terhadap pemilu (variabel dependen). Penelitian ini juga menguji validitas dan reliabilitas instrumen menggunakan uji validitas konten dan Cronbach Alpha. Data yang terkumpul dianalisis dengan teknik statistik deskriptif dan inferensial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika politik, termasuk kebijakan pemerintah, transparansi penyelenggara pemilu, dan stabilitas politik, berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan publik terhadap pemilu. Kebijakan yang adil dan transparansi dalam proses pemilu dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, sementara konflik politik antarpolisi dapat menurunkan partisipasi dan kepercayaan, khususnya di kalangan pemilih pemula. Uji validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa instrumen penelitian memiliki tingkat keandalan yang tinggi.

**Kata Kunci:** Dinamika Politik, Kepercayaan Publik, dan Pemilu.

### **Abstract**

*Elections are one of the main pillars of Indonesia's democratic system, giving people the opportunity to choose their leaders and representatives. However, political dynamics that occur during elections, such as inter-party conflicts, controversial government policies, and non-transparency in the electoral process, can affect public trust in the electoral system. This study aims to analyze the influence of political dynamics on public trust, especially first-time voters, towards elections in Indonesia. A quantitative approach was used with a survey technique, where data was obtained through questionnaires distributed to 100 respondents of novice voters in Jambangan District. Sampling was conducted using probability sampling techniques, and data analysis used multiple linear regression to test the relationship between political dynamics (independent variable) and public trust in elections (dependent variable). This study also tested the validity and reliability of the instrument using the content validity test and Cronbach Alpha. The collected data were analyzed using descriptive and inferential statistical techniques. The results show that political dynamics, including government policies, transparency of election organizers, and political stability, have a significant effect on the level of public trust in elections. Fair policies and transparency in the electoral process can increase public trust, while political conflict between parties can reduce participation and trust, especially among first-time voters. Validity and reliability tests show that the research instruments have a high level of reliability.*

**Keywords:** Political Dynamics, Public Trust, and Elections.

**How to Cite:** *Dharmawan, R. A. (2025). Pengaruh Dinamika Politik Terhadap Kepercayaan Publik Pada Pemilu Di Indonesia (Studi Kasus Pemilu 2024 Pada Pemilih Pemula Di Wilayah Kecamatan Jambangan Kota Surabaya). Dialektika Pendidikan IPS, Vol 5 (No. 01): 52-68.*

## **PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara demokrasi pancasila. Sistem demokarasi pancasila ini, rakyat memiliki kedaulatan tertinggi dan memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka. Mereka juga memiliki hak untuk meminta pemimpin mereka untuk memenuhi keinginan rakyat. Demokrasi umumnya adalah ilmu yang membahas bagaimana seorang pemimpin menerapkan apa yang telah diamanatkan rakyat, karena dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki otoritas tertinggi untuk mengatur pemerintahan. Mengingat bahwa demokrasi merupakan prinsip yang menyatakan bahwa rakyat adalah sumber kekuasaan, dan penguasa memperoleh kekuasaan atas apa yang telah diamanatkan oleh rakyat, demokrasi memberikan kebebasan kepada rakyat untuk bersuara dan menentukan siapa yang layak menjadi pemimpin mereka (Ulfiyyati Alifa et al., 2023).

Sistem pemilihan umum pertama kali diterapkan pada era orde lama tahun 1955 kepemimpinan Presiden Soekarno yang pada itu masih menerapkan sistem demokrasi terpimpin (Lubis et al., 2022). Sejak pemilihan umum pertama kali diselenggarakan hingga muncul gejolak politik yang terjadi pada tahun 1965 yang menjadi akhir dari era orde lama dibawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Dimulainya era orde baru dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto menandakan memulai era baru dalam perkembangan demokrasi Indonesia, orde berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Masa itu pemerintah memiliki kekuasaan absolut dalam menentukan siapa yang duduk di kursi parlemen sebagai wakil rakyat, yang berfungsi menjembatani hubungan antara rakyat dan pemerintah. Akibatnya, praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menjadi pemandangan umum selama era Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Tahun 1998, rakyat Indonesia menginginkan peran yang lebih besar dalam menentukan kepala negara dan pemimpin yang tepat, serta wakil rakyat yang mampu menjembatani kepentingan rakyat dan pemerintah. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap Presiden Soeharto, yang dianggap memerintah secara otoriter dan sewenang-wenang, mendorong rakyat untuk menuntut reformasi di berbagai bidang (Lubis et al., 2022).

Titik balik dalam sejarah demokrasi Pancasila di Indonesia dicapai pada tahun 2004, ketika masyarakat di Indonesia untuk pertama kalinya mengadakan pemilihan umum langsung, memberikan suara di TPS untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan pada saat itu dimenangkan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla, terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu 2024. Pemilu kali ini berlangsung demokratis, dan masyarakat menyambut pesta demokrasi dengan antusias karena memungkinkan penerapan konsep kedaulatan rakyat secara sah dan adil. (Erita, 2022).

Pemilu memegang peranan krusial dalam sistem demokrasi, termasuk di Indonesia, sebagai mekanisme utama untuk mengekspresikan kedaulatan rakyat. Sebagai negara demokrasi, Indonesia menjunjung tinggi prinsip bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, dan pemilu adalah cara utama untuk mewujudkannya. Melalui

pemilu, warga negara dapat berpartisipasi langsung dalam menentukan pemimpin dan wakil mereka di pemerintahan, serta arah kebijakan yang akan diambil (Firdaus, 2016). Selain itu, pemilu memberikan legitimasi kepada pemerintah, memastikan bahwa mereka memperoleh mandat yang sah dari rakyat untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Hal ini tidak hanya meningkatkan stabilitas politik tetapi juga memperkuat akuntabilitas dan transparansi pemerintahan, karena pejabat publik dapat dievaluasi dan dimintai pertanggungjawaban atas kinerja mereka (Alvons, 2018).

Dinamika politik secara umum merujuk pada perubahan dan interaksi yang terjadi dalam ranah politik suatu negara atau wilayah. Hal ini mencakup pergeseran kekuasaan, perubahan kebijakan, perubahan struktur dan fungsi institusi politik. Dinamika politik dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi seperti di Indonesia merujuk pada perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam proses politik, melibatkan aktor-aktor politik yang terkumpul di dalam berbagai partai politik yang ada serta institusi, dan kebijakan (Kadarisman Muh et al., 2021). Dalam sistem ini, kekuasaan tersebar di antara berbagai lembaga yang saling mengawasi dan mengimbangi, serta masyarakat memiliki peran penting melalui partisipasi aktif mereka (Dwiyanto, 2006).

Kepercayaan publik terhadap pemilu di Indonesia telah menjadi isu yang signifikan dan mendesak dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun pemilu merupakan pilar utama demokrasi yang menjamin kedaulatan rakyat namun tidak dipungkiri juga ada beberapa berbagai kasus kecurangan, manipulasi data, dan ketidaknetralan penyelenggara pemilu telah mencederai proses ini. Banyak masyarakat merasa skeptis terhadap kemampuan dan komitmen lembaga penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dalam menjalankan tugasnya secara transparan dan adil. Ditegaskan pada undang-undang bahwa pemilu dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sebagai penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan para pemangku kepentingan lainnya diwajibkan untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat. Peralpnya, membuat orang percaya pada pemilihan umum itu sulit (Gustrinanda, 2023), alih-alih kondisi saat ini banyak ditemukan ujaran kebencian, hoaks yang marak dilakukan ketika memasuki masa pemilihan umum. Dimulai dengan berkembangnya zaman melalui teknologi dan jaringan yang mampu membuat masyarakat terhubung dengan apapun dan siapapun membuat penyebaran *hatespeech*, *hoax* sangat mudah dilakukan.

Kasus-kasus dugaan pelanggaran hukum, manipulasi suara, manipulasi bansos, pengondisian PJ daerah, *money politic*, penyebaran hoaks, dan disinformasi selama masa kampanye dan pemilu semakin memperburuk situasi. Kepercayaan publik yang rendah terhadap integritas pemilu dapat mengancam stabilitas politik dan menurunkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, yang pada gilirannya dapat merusak legitimasi pemerintah yang terpilih (Ariska & Irhamdhika, 2024). Oleh karena itu, membangun dan memulihkan kepercayaan publik terhadap integritas pemilu melalui reformasi sistem pemilu, peningkatan transparansi, penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah menjadi penting untuk memastikan keberlanjutan demokrasi di Indonesia.

Kepercayaan publik terhadap pemerintah adalah salah satu indikator penting dalam menilai legitimasi dan efektivitas suatu pemerintahan. Kepercayaan ini dinilai dari sejauh mana masyarakat yakin bahwa pemerintah mampu mengelola negara secara adil, transparan, dan efisien. Sebaliknya, kepercayaan yang rendah sering kali disebabkan oleh penegakan hukum tajam kebawah namun tumpul keatas, skandal korupsi, ketidakmampuan dalam menangani isu sosial ekonomi, atau ketidakpuasan terhadap kebijakan-kebijakan yang dianggap merugikan (Rian Andhika, 2018). Faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepercayaan publik termasuk komunikasi pemerintah, partisipasi warga dalam proses politik, serta kondisi ekonomi dan sosial yang stabil.

Institusi politik ekstraktif dan korupsi berkelanjutan menunjukkan tata kelola pemerintahan yang buruk. Publik memberikan respons yang kritis terhadap situasi tersebut. Menurut penelitian lembaga survei, penurunan kepercayaan publik terhadap kelembagaan partai menunjukkan sikap publik terhadap politik. Pada tahap yang lebih mengkhawatirkan, kelompok muda merupakan faktor utama yang menyebabkan ketidakpercayaan terhadap institusi politik (Sutarna et al., 2023). Rendahnya kepercayaan terhadap politik sebaiknya dipahami sebagai bentuk apatisisme politik. Suatu sikap bahwa tidak ingin terlibat secara psikologis dalam urusan publik, dan pada tingkat tertentu tidak terlibat aktivitas politik (Mason et al., 1991). Pemilihan umum membutuhkan partisipasi seluruh warga negara. Partisipasi politik sangat penting karena setiap suara memiliki potensi untuk menentukan masa depan negara. Ini karena semangat konstitusi dalam memberikan kedaulatan kepada rakyat untuk mewujudkan *good local democracy*. (Palenewen, 2023).

Dunia pendidikan, peserta didik pun perlu dikenalkan dengan kegiatan demokrasi agar kelak dewasa dapat berpartisipasi dalam kegiatan demokrasi dan terhindar dari masalah-masalah demokrasi yang tidak diinginkan. Salah satu contohnya kegiatan pemilihan Ketua OSIS. Aristoteles menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu kebebasan atau prinsip demokrasi adalah kebebasan. Sebab, hanya melalui kebebasan setiap warga negara dapat saling berbagi kekuasaan didalam negaranya (Ulfah et al., 2023). Demokrasi di Indonesia saat ini masih menghadapi sejumlah masalah serius. Misalnya, dalam pelaksanaan pemilihan umum masih ditemukan praktik *money politic* dan masih ada masyarakat yang tidak memberikan suaranya atau golput. Padahal, pemilihan umum sebagai bentuk demokrasi adalah salah satu manifestasi dari implementasi sila keempat Pancasila (Mulyono & Fatoni, 2019). Maka dari itu, Proyek P5 dengan tema suara demokrasi untuk saling berkaitan dengan pengaruh dinamika politik terhadap kepercayaan publik pada pemilu, dalam beberapa aspek seperti pentingnya pendidikan demokrasi, partisipasi dalam pemilu, kesadaran politik menentukan masa depan bangsa serta pembentukan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila. Keduanya dapat berkontribusi dalam menciptakan pemilih yang sadar terhadap hak dan tanggung jawabnya dalam sistem demokrasi.

Dinamika politik pemilu di Kota Surabaya menunjukkan berbagai perkembangan menarik dalam beberapa tahun terakhir. Situasi politik saat ini lebih landai dibandingkan dengan Pemilu 2019. Hal ini terlihat dari proses pendaftaran bakal

calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya, petahana Eri Cahyadi dan Armuji mencalonkan diri kembali sebagai wali kota dan wakil wali kota Surabaya. Menariknya, Eri Cahyadi maju tanpa lawan dan berhasil memperoleh lebih dari 81% suara, mengalahkan opsi kotak kosong. Meskipun demikian, tingkat partisipasi pemilih di Surabaya tercatat sebagai yang terendah di Jawa Timur pada Pilkada 2024 (Amaluddin, 2024).

Berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu 2024 tingkat nasional yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, DPT Provinsi Jawa Timur menempati wilayah dengan DPT Pemilu terbanyak kedua setelah provinsi Jawa Tengah yaitu sebanyak 31.402.838 pemilih. Berdasarkan data yang diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya, partisipasi pemilu di Kecamatan Jambangan tergolong salah satu yang terendah di Kota Surabaya. Dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berjumlah 39.579 terdapat 8.892 surat suara yang tidak digunakan oleh masyarakat Kecamatan Jambangan. Tak dapat dipungkiri di daerah tersebut banyak tempat tinggal politisi ternama di Surabaya seperti Eri Cahyadi (Walikota Surabaya), Bambang Dwi Hartono (Eks Walikota Surabaya), Agoeng Prasodjo (DPRD Kota) yang menyebabkan anomali mengapa partisipasi pemilih di Kecamatan Jambangan menjadi salah satu yang terendah. Beredar beberapa fakta yang menjadi alasan kepercayaan masyarakat jambangan menjadi rendah yaitu dengan adanya kejadian joki pantarlih dalam hal memutakhirkan data daftar pemilih tetap, yang mana hal tersebut penting karena surat suara mengacu pada kemutakhiran daftar pemilih tetap, adapun salah satu warga berstatus sebagai penyelenggara pemilu yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) mengikuti reses yang dilakukan oleh salah satu calon legislatif pada saat itu serta terdapat gencar *money politic* dilakukan pada saat tahapan kampanye hingga hari pelaksanaan. Maka dari uraian yang telah penulis sampaikan diatas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut dan memuatnya dalam bentuk skripsi yang berjudul "Pengaruh Dinamika Politik Terhadap Kepercayaan Publik Pada Pemilu di Indonesia (Studi Kasus Pemilu 2024 Pada Pemilih Pemula Di Wilayah Kecamatan Jambangan Kota Surabaya)".

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan Pendekatan kuantitatif digunakan dengan teknik survei, di mana data diperoleh melalui kuesioner yang disebarkan kepada pemilih pemula yang ada di Kecamatan Jambangan. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *probability sampling*, sampel peneliti menggunakan rumus dari Slovin, berdasarkan perhitungan menggunakan rumus tersebut jumlah sampel yang harus didapatkan pada penelitian ini sebanyak 99,8 maka untuk memudahkan penelitian ini angka tersebut dibulatkan menjadi 100 responden. dan analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda untuk menguji hubungan antara variabel independen (dinamika politik) dan variabel dependen (kepercayaan publik terhadap pemilu). Penelitian ini juga menguji validitas dan reliabilitas instrumen menggunakan uji validitas konten dan *Cronbach Alpha*. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif dan inferensial. Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang tingkat kepercayaan publik terhadap pemilu, sementara analisis inferensial, seperti regresi linear berganda, digunakan untuk menguji pengaruh signifikan antara dinamika politik dan kepercayaan publik pada pemilu. Uji normalitas dan uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan kelayakan data untuk analisis lebih lanjut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengaruh Dinamika Politik terhadap Kepercayaan Publik pada Pemilu di Indonesia

Dinamika politik yang terjadi selama pemilu di Indonesia memainkan peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap proses demokrasi tersebut. Ketegangan antara partai politik sering kali menciptakan persepsi yang berdampak negatif terhadap kepercayaan publik, ketegangan antar partai ini memperburuk hubungan sosial dan memperkenalkan ketidakpercayaan terhadap keadilan pemilu (Agustin et al., 2024). Ketika masyarakat merasa bahwa pemilu tidak adil, mereka cenderung meragukan integritas sistem pemilu, yang dapat merusak proses demokrasi itu sendiri.

**Tabel 1 Kecenderungan Skor Pertanyaan Dinamika Politik terhadap Kepercayaan Publik pada Pemilu di Indonesia (Studi Kasus Pemilu 2024 pada Pemilih Pemula di Wilayah Kecamatan Jambangan Kota Surabaya)**

| Kategori           | Interval Skor   | Jumlah | Persentase (%) |
|--------------------|-----------------|--------|----------------|
| Sangat Baik        | $X > 115$       | 20     | 20%            |
| Baik               | $103 < X < 115$ | 9      | 9%             |
| Cukup Baik         | $91 < X < 103$  | 25     | 25%            |
| Kurang Baik        | $80 < X < 91$   | 37     | 37%            |
| Sangat Kurang Baik | $X < 80$        | 9      | 9%             |
| Jumlah             |                 | 100    | 100%           |

Sumber: Data primer, diolah (2024)

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh sebanyak 20 responden (20%) berada dalam kategori sangat baik, sebanyak 9 responden (9%) termasuk dalam kategori baik, sebanyak 25 responden (25%) berada dalam kategori cukup baik, sebanyak 37 responden (37%) masuk dalam kategori kurang baik, dan hanya 9 responden (9%) yang berada di kategori sangat kurang baik. Nilai rata-rata sebesar 97 terletak pada interval skor ( $91 < X < 103$ ), maka dapat disimpulkan bahwa dinamika politik terhadap kepercayaan publik pada pemilu di Indonesia (studi kasus pemilu 2024 pada pemilih pemula di wilayah Kecamatan Jambangan Kota Surabaya) adalah cukup baik. Berdasarkan data yang ada, penilaian responden terhadap dinamika politik dan kepercayaan publik terhadap pemilu 2024 di Indonesia, khususnya di kalangan pemilih pemula di Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, menunjukkan variasi yang mencerminkan pandangan beragam mengenai situasi politik saat ini. Sebagian responden menilai situasi politik sangat baik, yang menunjukkan adanya kelompok kecil yang sangat percaya terhadap proses politik yang akan datang. Kelompok lainnya memberikan penilaian yang baik, meskipun tidak sekuat kelompok pertama, menunjukkan bahwa ada optimisme meskipun masih ada beberapa keraguan. Sebagian besar responden menilai dinamika politik cukup baik, yang menunjukkan bahwa meskipun mereka merasa cukup puas, ada beberapa aspek yang masih perlu diperbaiki.

Dari keseluruhan hasil yang didapatkan, kemudian dipecah per indikator sebagai berikut:

**a. Kebijakan Politik**

Kebijakan politik dapat mencakup peraturan terkait penyelenggaraan pemilu, kampanye politik, atau kebijakan partisipasi politik yang dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

**Tabel 2 Kecenderungan Skor Pertanyaan Kebijakan Politik**

| Kategori           | Interval Skor | Jumlah | Persentase (%) |
|--------------------|---------------|--------|----------------|
| Sangat Baik        | $X > 39$      | 16     | 16%            |
| Baik               | $34 < X < 39$ | 18     | 18%            |
| Cukup Baik         | $30 < X < 34$ | 42     | 42%            |
| Kurang Baik        | $26 < X < 30$ | 16     | 16%            |
| Sangat Kurang Baik | $X < 26$      | 8      | 8%             |
| Jumlah             |               | 100    | 100%           |

Sumber: Data primer, diolah (2024)

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh sebanyak 16 responden (16%) berada dalam kategori sangat baik, sebanyak 18 responden (18%) berada dalam kategori baik, mayoritas responden, yaitu 42 responden (42%), berada dalam kategori sangat cukup baik, sebanyak 16 responden (16%) berada dalam kategori kurang baik, dan hanya 8 responden (2%) berada dalam kategori sangat kurang baik. Nilai rata-rata sebesar 32 terletak pada interval skor  $31 < (30 < X < 34)$ , maka dapat disimpulkan bahwa pertanyaan kebijakan politik adalah cukup baik. Kebijakan politik yang diterapkan memperoleh respons yang relatif positif, namun respons ini juga mengindikasikan adanya ruang yang signifikan untuk perbaikan. Meskipun sebagian besar responden menilai kebijakan tersebut cukup baik, masih ada segmen masyarakat yang merasa bahwa kebijakan yang diterapkan belum cukup efektif dalam memenuhi harapan mereka. Ketidakpuasan ini bisa jadi mencerminkan ketidaksesuaian antara kebijakan yang ada dengan kebutuhan atau keinginan sebagian masyarakat, atau bisa juga menunjukkan kekhawatiran tentang dampak jangka panjang dari kebijakan tersebut. Sebagian kalangan merasa bahwa meskipun kebijakan politik sudah menuju arah yang benar, ada kekurangan dalam implementasi atau dalam penyampaian informasi yang cukup jelas mengenai tujuan dan manfaat dari kebijakan tersebut. Fenomena ini juga mencerminkan pentingnya evaluasi dan penyesuaian kebijakan secara terus-menerus. Untuk memastikan kebijakan tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, pemerintah perlu mendengarkan umpan balik dari berbagai lapisan masyarakat dan melakukan perubahan atau perbaikan yang diperlukan.

**b. Stabilitas Politik**

Stabilitas politik sangat penting bagi kelangsungan demokrasi dan pembangunan negara, karena tanpa stabilitas, sistem politik dapat terganggu, mempengaruhi perekonomian, dan mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi negara.

**Tabel 3 Kecenderungan Skor Pertanyaan Stabilitas Politik**

| Kategori           | Interval Skor | Jumlah | Persentase (%) |
|--------------------|---------------|--------|----------------|
| Sangat Baik        | $X > 31$      | 13     | 13%            |
| Baik               | $28 < X < 31$ | 16     | 16%            |
| Cukup Baik         | $24 < X < 28$ | 49     | 49%            |
| Kurang Baik        | $21 < X < 24$ | 19     | 19%            |
| Sangat Kurang Baik | $X < 21$      | 3      | 3%             |
| Jumlah             |               | 100    | 100%           |

Sumber: Data primer, diolah (2024)

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh sebanyak 13 responden (13%) berada dalam kategori sangat baik, sebanyak 16 responden (16%) berada dalam kategori baik, mayoritas responden, yaitu 49 responden (49%) berada dalam kategori cukup baik, sebanyak 19 responden (19%) berada dalam kategori kurang baik, dan hanya 3 responden (3%) yang berada dalam kategori sangat kurang baik. Nilai rata-rata sebesar 26 terletak pada interval skor ( $24 < X < 28$ ), maka dapat disimpulkan bahwa pertanyaan stabilitas politik adalah cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun stabilitas politik dianggap penting dan berjalan dengan cukup baik oleh mayoritas, masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan diperbaiki agar stabilitas tersebut dapat tercapai dengan lebih maksimal. Penilaian ini mungkin mencerminkan adanya ketidakpuasan terhadap beberapa faktor tertentu dalam politik, seperti ketidakpastian kebijakan, ketidakstabilan ekonomi, atau rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam politik, yang dapat mempengaruhi kepercayaan terhadap pemerintah. Langkah-langkah yang lebih konkret dalam menjaga kedamaian politik, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta memperkuat institusi negara untuk meningkatkan kepercayaan publik. Jika hal ini tercapai, stabilitas politik dapat semakin kuat, yang pada gilirannya akan mendukung kelangsungan demokrasi dan mempercepat pembangunan negara.

**c. Kepercayaan Publik**

Kepercayaan publik yang tinggi sangat penting dalam proses demokrasi, karena hal ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memilih pemimpin dan mendukung kebijakan yang dianggap bermanfaat bagi banyak orang.

**Tabel 4 Kecenderungan Skor Pertanyaan Kepercayaan Publik**

| Kategori           | Interval Skor | Jumlah | Persentase (%) |
|--------------------|---------------|--------|----------------|
| Sangat Baik        | $X > 47$      | 17     | 17%            |
| Baik               | $42 < X < 47$ | 10     | 10%            |
| Cukup Baik         | $36 < X < 42$ | 53     | 53%            |
| Kurang Baik        | $31 < X < 36$ | 17     | 17%            |
| Sangat Kurang Baik | $X < 31$      | 3      | 3%             |
| Jumlah             |               | 100    | 100%           |

Sumber: Data primer, diolah (2024)

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh sebanyak 17 responden (17%) berada dalam kategori sangat baik, sebanyak 10 responden (10%) berada dalam kategori baik, mayoritas responden, yakni 53 responden (53%) berada dalam kategori cukup baik, sebanyak 17 responden (17%) berada dalam kategori kurang baik dan hanya 3 responden (3%) berada dalam kategori sangat kurang baik. Nilai rata-rata sebesar 39 terletak pada interval skor ( $36 < X < 42$ ), maka dapat disimpulkan bahwa pertanyaan kepercayaan publik adalah cukup baik. Penilaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat merasa bahwa kepercayaan publik terhadap pemerintah dan proses demokrasi berada dalam kondisi yang relatif positif, tetapi tidak sepenuhnya tanpa masalah. Ketidakpuasan atau keraguan mungkin muncul terkait dengan kinerja pemerintah, transparansi dalam pengambilan keputusan, atau efektivitas kebijakan yang diterapkan. Meskipun demikian, mereka masih menilai bahwa secara keseluruhan kepercayaan publik cukup baik, yang bisa menunjukkan adanya keyakinan terhadap potensi perubahan dan perbaikan dalam sistem politik. Kepercayaan publik bisa lebih ditingkatkan dengan melakukan, penting bagi pemerintah untuk terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap proses politik, serta memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar menjawab kebutuhan dan harapan publik.

Kepercayaan publik terhadap pemilu merupakan salah satu elemen fundamental yang menentukan keberhasilan demokrasi di Indonesia. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa dinamika politik, yang mencakup stabilitas politik dan kebijakan politik, memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan publik. Dalam konteks ini, kebijakan politik yang jelas, transparan, dan pro-rakyat terbukti menjadi salah satu faktor penting yang meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan politik memberikan kontribusi positif terhadap tingkat kepercayaan publik. Koefisien regresi yang diperoleh mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu unit dalam kebijakan politik dapat meningkatkan kepercayaan publik pada pemilu. Temuan ini sejalan dengan studi yang dilakukan pada tahun 2019 oleh (Harnawansyah, 2019), yang menyoroti pentingnya kebijakan daerah yang inklusif dalam menjaga legitimasi sistem pemilu. Kebijakan politik yang proaktif juga berfungsi sebagai sarana edukasi politik yang dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap proses demokrasi. Serta

dinamika politik memiliki peran yang signifikan, baik dalam membangun maupun menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu.

Stabilitas politik juga berperan krusial dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemilu. Penelitian ini menemukan koefisien regresi untuk stabilitas politik, menunjukkan bahwa variabel ini memberikan dampak yang lebih besar dibandingkan kebijakan politik. Stabilitas politik yang terjaga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penyelenggaraan pemilu yang adil dan transparan, sebagaimana diungkapkan oleh (Setiawan et al., 2024), dalam kajiannya tentang prinsip LUBER JURDIL, stabilitas politik yang tinggi mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan rasa percaya publik terhadap pemerintah dan lembaga pemilu.

Kepercayaan publik terhadap pemilu dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti transparansi proses pemilu, integritas penyelenggara pemilu, perilaku partai politik dan kandidat, netralitas aparat negara. Sebagaimana disoroti oleh (Gustrinanda, 2023), tingkat kepercayaan masyarakat pada pemilu sering kali berkorelasi dengan persepsi mereka terhadap keadilan dan transparansi proses pemilu. Kepercayaan publik ini menjadi salah satu indikator utama dalam menilai legitimasi dan keberhasilan sistem demokrasi di suatu negara. Oleh karena itu, penting bagi para pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa setiap tahap proses pemilu dilakukan secara jujur, terbuka, dan profesional demi menjaga stabilitas politik dan partisipasi masyarakat.

Faktor lain yang turut memengaruhi kepercayaan publik adalah peran lembaga penyelenggara pemilu, seperti KPU. Penelitian yang dilakukan oleh (Andini, 2020), menekankan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap KPU menjadi salah satu indikator utama keberhasilan pemilu. Dalam studi kasus ini, responden menunjukkan bahwa transparansi dan profesionalisme KPU menjadi faktor utama yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kapabilitas dan kredibilitas lembaga ini sangat penting untuk memastikan partisipasi yang lebih luas dari masyarakat, terutama pemilih pemula.

Kepercayaan terhadap lembaga penyelenggara pemilu, seperti KPU dan Bawaslu, sangat penting untuk menjaga integritas pemilu. Masyarakat akan lebih percaya pada hasil Pemilu jika lembaga penyelenggara dapat menunjukkan akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan tugasnya (Suryadi, 2023). Oleh karena itu, KPU dan Bawaslu harus lebih proaktif dalam memberikan penjelasan mengenai setiap tahap Pemilu dan memastikan bahwa proses Pemilu berjalan dengan adil dan bebas dari campur tangan pihak luar.

Keputusan yang dibuat oleh KPU yang waktu lalu ramai dan viral yang menunjukkan dampak dinamika politik terhadap kepercayaan publik adalah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai perubahan batas usia calon presiden pada tahun 2024. Keputusan tersebut menyebabkan kecurigaan terhadap netralitas lembaga negara. Banyak masyarakat merasa bahwa kebijakan ini lebih menguntungkan pihak tertentu (Fadhillah et al., 2024), yang semakin memperburuk pandangan terhadap lembaga-lembaga yang terlibat dalam

penyelenggaraan pemilu. Hal ini menciptakan ketidakpercayaan terhadap lembaga negara yang seharusnya netral, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yang memegang peran vital dalam menjaga keadilan proses pemilu.

Penelitian ini juga menemukan bahwa adanya dinamika politik yang tidak stabil dapat menurunkan kepercayaan publik. Sebagai contoh, isu-isu politik yang kontroversial atau konflik antarpolisi sering kali menciptakan ketidakpastian yang berdampak negatif pada persepsi masyarakat terhadap pemilu. Studi yang pernah dilakukan oleh (Rohim & Wardana, 2019), tentang persepsi pemilih pada Pemilu 2019 menunjukkan bahwa konflik politik dapat merusak citra demokrasi di mata pemilih muda. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih strategis dalam mengelola dinamika politik untuk meminimalkan dampak negatifnya terhadap kepercayaan publik.

Ketegangan antara partai politik atau antar kandidat calon pemimpin dapat menciptakan ketidakstabilan politik (Kamuli et al., 2023). Ketidakstabilan ini dapat mengurangi keyakinan masyarakat terhadap kemampuan negara dalam menyelenggarakan pemilu yang adil dan transparan. Oleh karena itu, menjaga stabilitas politik di kalangan elit politik sangat penting untuk memastikan Pemilu berjalan dengan lancar dan aman.

Hasil analisis korelasi dalam penelitian ini menunjukkan hubungan yang kuat antara kebijakan politik, stabilitas politik, dan kepercayaan publik. Hubungan ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas kebijakan dan stabilitas politik dapat secara langsung memperbaiki tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemilu. Hal ini sesuai dengan temuan (Telaumbanua, 2023), yang menggarisbawahi pentingnya peran pemuda dalam menjaga stabilitas politik untuk mendukung demokrasi yang berkelanjutan.

Dinamika politik yang sehat dapat meningkatkan legitimasi pemerintah dan memperkuat proses demokrasi. Sebaliknya, dinamika politik yang dipenuhi ketidakstabilan dapat menyebabkan apatisisme politik dan menurunkan tingkat partisipasi masyarakat. Dalam hal ini, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya sinergi antara aktor politik, pemerintah, dan lembaga penyelenggara pemilu untuk menciptakan dinamika politik yang kondusif.

Ketika masyarakat merasa bahwa pemilu dilaksanakan dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, maka kepercayaan publik terhadap Pemilu akan meningkat. Sebaliknya, jika terjadi pelanggaran atau ketidakjelasan dalam proses pemilu, kepercayaan masyarakat akan terganggu. Oleh karena itu, menjaga integritas Pemilu dan melibatkan masyarakat dalam setiap tahapannya sangat penting untuk memastikan bahwa Pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.

Penting untuk menciptakan ruang diskusi yang sehat dan terbuka dalam masyarakat, di mana warga negara dapat berdiskusi mengenai isu-isu politik tanpa adanya polarisasi yang merugikan. Diskusi yang sehat dapat memperkuat

pemahaman masyarakat tentang proses pemilu dan memperbaiki kepercayaan mereka terhadap sistem demokrasi yang ada. Dalam konteks ini, peran media sosial juga sangat besar, karena dapat menyebarkan informasi yang benar dan menghindari penyebaran hoaks yang dapat merusak kepercayaan publik.

Pemilu yang adil dan transparan merupakan kunci untuk menjaga stabilitas demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, semua pihak baik pemerintah, lembaga penyelenggara pemilu, partai politik, dan masyarakat harus bekerja sama untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung dengan adil dan bebas dari praktik yang dapat merusak integritasnya. Melalui upaya ini, diharapkan kepercayaan publik terhadap Pemilu dapat terus terjaga, sehingga pemilu dapat menjadi proses yang benar-benar mencerminkan suara rakyat.

Menurut teori kepercayaan sosial yang dikemukakan oleh Piotr Sztompka (1997), tiga indikator utama yang digunakan dalam penelitian ini kebijakan politik, stabilitas politik, dan kepercayaan publik saling berkaitan erat dalam menentukan tingkat kepercayaan sosial masyarakat terhadap sistem politik, khususnya selama pemilu. Kebijakan politik yang adil, transparan, dan pro-rakyat berfungsi sebagai fondasi utama untuk membangun kepercayaan sosial. Menurut Sztompka, kepercayaan dibangun melalui pengalaman dan interaksi masyarakat dengan institusi. Stabilitas politik menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan kepercayaan sosial. Menurut teori Sztompka, stabilitas politik yang tinggi mengurangi ketidakpastian sosial, yang merupakan prasyarat penting bagi kepercayaan. Kepercayaan ini dipengaruhi langsung oleh kebijakan politik dan stabilitas politik. Dalam teori Sztompka, kepercayaan publik adalah modal sosial yang diperoleh dari konsistensi pengalaman positif masyarakat terhadap integritas sistem politik. etika kebijakan dan stabilitas politik saling mendukung, masyarakat cenderung memiliki persepsi positif terhadap keadilan dan transparansi pemilu, sehingga meningkatkan partisipasi mereka dalam proses politik. Sebaliknya, manipulasi atau ketidakadilan dalam pemilu dapat merusak kepercayaan ini dan menyebabkan apatisme politik.

Ketiga indikator ini memiliki makna hubungan timbal balik yang kuat dalam konteks kepercayaan sosial. Kebijakan politik yang baik mendorong stabilitas politik, yang pada gilirannya memperkuat kepercayaan publik. Dalam kerangka teori Sztompka, interaksi yang konsisten antara masyarakat dan institusi politik yang berlandaskan keadilan dan transparansi merupakan kunci utama untuk menjaga kepercayaan sosial. Oleh karena itu, menjaga sinergi antara kebijakan politik yang inklusif, stabilitas politik yang kokoh, dan partisipasi masyarakat yang aktif adalah langkah strategis untuk membangun legitimasi demokrasi yang berkelanjutan.

Jangka panjangnya nanti, yakni menjaga kepercayaan publik terhadap pemilu tidak hanya bergantung pada kebijakan yang diambil, tetapi juga pada pendidikan politik yang terus ditingkatkan di kalangan masyarakat. Pendidikan politik yang efektif dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya Pemilu bagi kemajuan bangsa dan negara. Melalui pendidikan ini,

masyarakat akan semakin sadar akan peran mereka dalam menentukan arah masa depan Indonesia melalui partisipasi aktif dalam pemilu.

## **2. Tingkat Partisipasi Pemilih Pemula di Kecamatan Jambangan pada Pemilu 2024 Berdasarkan Dinamika yang Terjadi**

Partisipasi pemilih pemula merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan sebuah pemilu. Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih pemula di Kecamatan Jambangan berada pada tingkat yang cukup baik, meskipun terdapat berbagai tantangan yang memengaruhi keterlibatan mereka. Mayoritas responden dalam penelitian ini menunjukkan keinginan untuk berpartisipasi dalam pemilu, namun terdapat faktor-faktor tertentu yang menghambat partisipasi aktif mereka.

Faktor kepercayaan terhadap proses politik menjadi salah satu penentu utama partisipasi pemilih muda. Sebagaimana diungkapkan oleh (Solikhudin et al., 2024), pemilih muda cenderung terpengaruh oleh persepsi mereka terhadap transparansi dan keadilan proses pemilu. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa tingkat kepercayaan yang cukup baik terhadap penyelenggaraan pemilu di Kecamatan Jambangan mendorong partisipasi aktif sebagian besar pemilih pemula. Banyak pemilih pemula yang merasa ragu untuk berpartisipasi karena adanya dugaan kecurangan dalam Pemilu sebelumnya, seperti politik uang dan manipulasi suara. Ketidakpercayaan terhadap integritas Pemilu ini merupakan salah satu tantangan terbesar yang harus diatasi dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih muda.

Partisipasi pemilih pemula juga dipengaruhi oleh pemahaman mereka terhadap calon pemimpin dan visi misi yang mereka tawarkan. Penelitian yang dilakukan oleh (Sugitanata, 2023), banyak pemilih muda yang merasa bingung atau kurang tertarik dengan calon yang ada karena kurangnya informasi yang memadai mengenai rekam jejak dan kebijakan yang mereka usung. Oleh karena itu, penting bagi calon pemimpin untuk lebih aktif dalam menyosialisasikan program-program mereka, serta menciptakan ruang diskusi yang memungkinkan pemilih pemula untuk lebih memahami visi misi mereka. Diskusi terbuka antara calon pemimpin dan masyarakat, baik melalui debat publik maupun platform digital, dapat membantu pemilih muda dalam membuat keputusan yang lebih informasional.

Penelitian ini juga menemukan bahwa edukasi politik memiliki peran signifikan dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula. Program-program yang memberikan informasi mengenai pentingnya pemilu dan hak pilih telah terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran politik di kalangan pemilih muda. Sebagai contoh, program "Cerdas Pemilu" yang dibahas (Satriawan et al., 2020), menunjukkan bahwa pendekatan edukatif mampu meminimalkan tingkat apatisisme politik di kalangan pemilih pemula. Dengan pendekatan yang menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka, pemilih muda dapat lebih mudah memahami peran penting mereka dalam demokrasi.

Pemilih pemula yang merasa bingung atau kurang tertarik dengan calon yang ada karena kurangnya informasi yang memadai mengenai rekam jejak dan kebijakan yang mereka usung. Oleh karena itu, penting bagi calon pemimpin untuk lebih aktif dalam menyosialisasikan program-program mereka, serta menciptakan ruang diskusi yang memungkinkan pemilih pemula untuk lebih memahami visi misi mereka. Diskusi terbuka antara calon pemimpin dan masyarakat, baik melalui debat publik maupun platform digital, dapat membantu pemilih muda dalam membuat keputusan yang lebih informasional.

Keterlibatan pemuda dalam politik sering kali dipengaruhi oleh akses informasi dan kampanye politik yang menarik. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa media sosial memainkan peran penting dalam membentuk persepsi dan minat pemilih pemula. Sebagaimana diungkapkan oleh (Feby & Farida, 2024), media sosial menjadi platform yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan politik kepada pemilih muda. Pemilu melalui media sosial bisa menjadi alternatif yang efektif dalam meningkatkan partisipasi mereka. Penyebaran informasi yang akurat dan mudah dipahami di media sosial juga dapat mengurangi penyebaran hoaks yang sering kali menjadi hambatan dalam Pemilu. Dengan demikian, partai politik dan kandidat perlu memanfaatkan media sosial secara strategis untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula.

Namun, terdapat tantangan signifikan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih muda, termasuk apatisisme politik dan rendahnya pemahaman terhadap sistem pemilu. Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh (Febriano et al., 2024) menunjukkan bahwa fenomena golput sering kali disebabkan oleh rasa tidak percaya terhadap sistem politik. Dalam konteks Kecamatan Jambangan, isu serupa juga ditemukan, meskipun dalam skala yang lebih kecil. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga pemilu, dan masyarakat untuk mengatasi tantangan ini. Untuk itu, pengawasan terhadap praktik ini harus lebih diperketat, dan hukum yang berlaku harus ditegakkan dengan adil. Lembaga penyelenggara Pemilu, seperti KPU dan Bawaslu, harus lebih transparan dan tegas dalam menangani kasus-kasus politik uang yang dapat merusak kredibilitas Pemilu.

Penelitian ini juga menemukan bahwa keluarga dan lingkungan sosial memiliki pengaruh besar terhadap keputusan pemilih pemula untuk berpartisipasi dalam pemilu. Sebagaimana diungkapkan oleh (Telaumbanua, 2023), keterlibatan pemuda dalam politik sering kali dipengaruhi oleh dukungan keluarga dan teman sebaya. Oleh karena itu, pendekatan berbasis komunitas dapat menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan partisipasi pemilih muda. Secara keseluruhan, tingkat partisipasi pemilih pemula di Kecamatan Jambangan mencerminkan potensi besar bagi keberlanjutan demokrasi di Indonesia. Dengan meningkatkan kepercayaan publik, menyediakan edukasi politik yang memadai, dan menciptakan dinamika politik yang kondusif, partisipasi pemilih muda dapat terus ditingkatkan di masa depan.

Penting untuk terus melakukan upaya-upaya yang dapat meningkatkan partisipasi pemilih pemula dalam pemilu 2024. Peningkatan literasi politik,

pengawasan terhadap praktik politik uang, serta transparansi dalam penyelenggaraan pemilu adalah langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa pemilu 2024 dapat berlangsung dengan adil dan kredibel. Pemilih pemula yang teredukasi dan termotivasi akan menjadi kekuatan yang mendorong perubahan positif dalam sistem politik Indonesia, serta memastikan bahwa demokrasi tetap berjalan dengan baik.

Pemilih pemula memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan dan kualitas demokrasi di Indonesia. Sebagai generasi muda yang pertama kali menggunakan hak pilih mereka dalam Pemilu 2029, pemilih pemula tidak hanya menjadi kelompok yang menentukan arah politik negara, tetapi juga menjadi cerminan dari dinamika politik dan sosial yang terjadi. Berdasarkan analisis dalam skripsi ini, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan untuk memahami peran dan tantangan yang dihadapi oleh pemilih pemula dalam Pemilu 2029. Pemilih pemula cenderung lebih idealis dan bersemangat untuk berpartisipasi dalam demokrasi, tetapi mereka juga sangat rentan terhadap ketidakpastian politik dan sosial yang sering kali ditimbulkan oleh ketegangan antarpartai, kebijakan yang tidak konsisten, atau praktik manipulatif dalam pemilu. Pemilih pemula di Pemilu 2029 akan memainkan peran kunci dalam menentukan arah demokrasi Indonesia ke depan. Dengan tantangan besar seperti ketidakpercayaan terhadap sistem politik, praktik politik uang, dan pengaruh media sosial, penting untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam membangun kepercayaan dan partisipasi mereka. Melalui pendidikan politik, transparansi, serta keterlibatan aktif dalam pengawasan pemilu, kita dapat memastikan bahwa pemilih pemula tidak hanya terlibat dalam proses pemilu, tetapi juga menjadi agen perubahan yang membawa kemajuan bagi demokrasi Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian ini, dinamika politik memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan publik terhadap pemilu di Indonesia. Stabilitas politik menjadi faktor yang paling menentukan, karena menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pelaksanaan pemilu yang adil, transparan, dan demokratis. Ketika stabilitas politik terganggu oleh konflik antarpartai atau isu-isu politik kontroversial, masyarakat cenderung kehilangan kepercayaan terhadap integritas proses pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas politik harus menjadi prioritas bagi pemerintah dan aktor politik untuk memastikan kelancaran dan kredibilitas pemilu. Kebijakan politik yang transparan juga terbukti memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Kebijakan yang pro-rakyat tidak hanya meningkatkan rasa percaya, tetapi juga memberikan edukasi politik yang memperkuat pemahaman publik tentang pentingnya demokrasi. Penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kredibilitas mereka dengan menunjukkan profesionalisme, akuntabilitas, dan transparansi dalam setiap tahap pemilu. Partisipasi pemilih pemula di Kecamatan Jambangan menjadi sorotan dalam penelitian ini. Meski cukup baik, tantangan seperti apatisisme politik dan rendahnya pemahaman terhadap sistem pemilu masih ditemukan. Media sosial terbukti efektif sebagai platform edukasi politik, terutama untuk pemilih muda. Namun, penggunaan media sosial ini harus diiringi dengan pengawasan terhadap penyebaran informasi palsu yang dapat merusak kepercayaan masyarakat. Dinamikanya, politik yang sehat sangat diperlukan untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Konflik politik, polarisasi masyarakat, dan keputusan kontroversial lembaga negara perlu diminimalkan agar tidak menciptakan ketidakpercayaan yang lebih besar. Sinergi antara aktor

politik, lembaga penyelenggara pemilu, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci dalam membangun dinamika politik yang kondusif. Keseluruhan penelitian ini menyoroti pentingnya stabilitas politik, kebijakan inklusif, dan profesionalisme lembaga penyelenggara pemilu untuk meningkatkan kepercayaan publik. Dengan dinamika politik yang sehat, kepercayaan masyarakat terhadap pemilu dapat terjaga, sehingga demokrasi di Indonesia dapat terus berkembang dan mencerminkan aspirasi rakyat secara nyata.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, S., Maharani, R., & Ramadhani, R. (2024). Dinamika Ketegangan Politik Pasca Pemilu 2024 Dalam Mempertahankan Stabilitas Demokrasi Di Indonesia. *GOVERNANCE : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(02), 235–252. <https://doi.org/https://doi.org/10.33558/governance.v12i2.9742>
- Alvons, M. (2018). Kebebasan Keamanan, Keadilan Dan Kedamaian Dalam Pemilihan Umum Untuk Stabilitas Negara. *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, 15(4), 295–307.
- Amaluddin. (2024). Kota Surabaya Daerah Partisipasi Pemilih Terendah se-Jatim pada Pilkada 2024. [metrotvnews.com](https://www.metrotvnews.com). <https://www.metrotvnews.com/read/bmRCeR9O-kota-surabaya-daerah-partisipasi-pemilih-terendah-se-jatim-pada-pilkada-2024>
- Arif Sugitanata. (2023). Dinamika Keputusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden. *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(2), 23–42. <https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v4i2.79>
- Ariska, Y., & Irhamdhika, G. (2024). Jurnal Media Penyiaran “ Representasi Kecurangan Pemilu 2024 Dalam Film Dokumenter “ Dirty Vote ” Jurnal Media Penyiaran. *Jurnal Media Penyiaran*, 04, 8–19.
- Dwiyanto, A. (2006). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Erita, R. (2022). Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Indonesia Sebagai Negara Demokrasi Pancasila. *Journal Justiciabelen (Jj)*, 2(1), 70. <https://doi.org/10.35194/jj.v2i1.1941>
- Febriano, I. R., Amaliyah, A., & Sisilia, M. P. (2024). Persepsi Masyarakat Tentang Adanya Fenomena Golput Dalam Pemilu Di-Kawasan Surabaya. *Sanskara Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(02), 104–108. <https://doi.org/10.58812/sish.v1.i02>
- Feby, M. ;, & Farida, A. M. (2024). Pandangan Mahasiswa Terhadap Dinamika Polemik Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Pendidikan*, 1(1), 08–15. <https://doi.org/10.62951/prosemnasipi.v1i1.2>
- Firdaus, S. U. (2016). Relevansi Parliamentary Threshold terhadap Pelaksanaan Pemilu yang Demokratis. *Jurnal Konstitusi*, 8(2), 91. <https://doi.org/10.31078/jk825>
- Gustrinanda, R. (2023). Pentingnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemilu. *Journal of Practice Learning and Educational Development*, 3(1), 100–106. <https://doi.org/10.58737/jpled.v3i1.102>
- Harnawansyah, M. F. (2019). Dinamika Politik Daerah Dalam Pelaksanaan Sistem Pemilu Umum Legislatif Daerah. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 4(9), 50–64. <https://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf>
- Kadarisman Muh, Izzarusholekha, & Putra Nadia. (2021). Dinamika Politik Dalam Dinamika Politik Dalam Reformasi Administrasi Publik. *KAIS Kajian Ilmu Sosial*, 2, 141–157.
- Kamuli, S., Latore, S., & Sahi, Y. (2023). Implikasi Konflik Partai Politik Terhadap Paradigma Pemilih Pemula Menjelang Pemilu 2024 Studi Pada Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo. *JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(3), 3158–3170. <https://doi.org/https://doi.org/10.24815/jimps.v8i3.26413>
- Lubis, M. A., Gea, M. Y. A., & Muniifah, N. (2022). Penerapan Asas Pemilu Terhadap Electronic Voting (E-Voting) Pada Pemilu Tahun 2024. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 9(1), 44–56. <https://doi.org/10.31289/jiph.v9i1.6491>
- Mason, D. S., Nelson, D. N., & Szklarski, B. M. (1991). Apathy and the Birth of Democracy: The Polish Struggle. *East European Politics & Societies*, 5(2), 205–233.

- <https://doi.org/10.1177/0888325491005002001>
- Mulyono, G. P., & Fatoni, R. (2019). Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia. *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(2), 97–107.
- Palenewen, J. D. O. (2023). Sosialisasi Politik Bagi Pemilih Pemula Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Palangka Raya. *Ruang Komunitas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 8–14. <https://doi.org/10.24252/rkjpm.v1i1.36303>
- Rian Andhika, L. (2018). Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Pemerintah Melalui Redesain Proses Kebijakan. *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*, 3(1), 24–42. <https://doi.org/10.24905/jip.3.1.2018.24-42>
- Satriawan, I., Gunawan, Y., Sulaiman, K. F., & Hafiz, M. B. A. (2020). Pemilih Pemula “Cerdas Pemilu.” *J-Dinamika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 122–126. <https://doi.org/10.25047/j-dinamika.v5i2.1468>
- Setiawan, M. O. E., Kirana, D. K., & Priza, S. (2024). Demokrasi Indonesia Dalam Kapasitas Pemilu yang Luber Jurdil. *Jolasos: Journal of Law and Social Society*, 1(1), 11–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.70656/jolasos.v1i1.80>
- Solikhudin, M., Aziz, A. F., Rifqi, M. J., & Rohman, M. F. (2024). Pemilihan Umum Serentak, Pemilih Muda Dan Fikih Good Governance (Kontestasi dan Dinamika Pemilihan Umum dalam Negara Demokratis). *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 5(2), 176–198. <https://doi.org/https://doi.org/10.52431/minhaj.v5i2.2506>
- Sutarna, I. T., Subandi, A. S., & Zitri, I. (2023). Pendidikan Politik Untuk Pemilih Pemula: Inisiatif Untuk Integritas Pemilu. *Transformasi: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 3(1), 38. <https://doi.org/10.31764/transformasi.v3i1.14723>
- Telaumbanua, J. J. P. (2023). Keterlibatan Pemuda dalam Politik: Dinamika dan Tantangan. *Literacy Notes*, 1(2), 1–11.
- Ulfah, N., Sumardiyani, L., Ardini, S. N., & Pramesti, M. R. D. (2023). Implementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) Dengan Tema Suara Demokrasi Di Smk Negeri 6 Semarang. *PRIMER: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4), 455–462. <https://doi.org/10.55681/primer.v1i4.178>
- Ulfyyati Alifa, Muhamad Ridho, Barri Mulki fathur, & Akbari Ilham Sultan. (2023). Demokrasi: Tinjauan Terhadap Konsep, Tantangan, Dan Prospek Masa Depan. *ADVANCES in Social Humanities Research*, 1(4), 435–444. <https://www.adshr.org/index.php/vo/article/view/48>